PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 1 Oktober 2026

Nomor : 800.1.9.1/6869/204.2/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Undangan Desk Kualitas Data ASN dan Sosialisasi Sistem Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu

Yth. Kepala Perangkat Daerah (Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi serta mendukung kelancaran perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan Desk Kualitas Data ASN dan Sosialisasi Sistem Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula 1 Lt.5 BKD Provinsi Jawa Timur, Jl. Jemur Andayani No.1 Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian yang menangani data kepegawaian dan usulan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu di instansi Saudara untuk menghadiri kegiatan dimaksud dengan membawa laptop. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Ulfa (0821-3291-8915).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.9.1/6869/204.2/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

DAFTAR UNDANGAN

No	Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Pendapatan Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Badan Penghubung Daerah Provinsi
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
10	Bakorwil I Madiun
11	Bakorwil II Bojonegoro
12	Bakorwil III Malang
13	Bakorwil IV Pamekasan
14	Bakorwil V Jember
15	Biro Administrasi Pembangunan
16	Biro Administrasi Pimpinan
17	Biro Hukum
18	Biro Kesejahteraan Rakyat
19	Biro Organisasi
20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
21	Biro Pengadaan Barang/Jasa
22	Biro Perekonomian
23	Biro Umum
24	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26	Dinas Kehutanan
27	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
29	Dinas Kesehatan
30	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
32	Dinas Lingkungan Hidup
33	Dinas P3AK
34	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
35	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Dinas Pendidikan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

No	Perangkat Daerah
39	Dinas Perhubungan
40	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
41	Dinas Perkebunan
42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
44	Dinas Peternakan
45	Dinas PR Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
46	Dinas Sosial
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Inspektorat Provinsi
49	RS Jiwa Menur Surabaya
50	RS Paru Jember
51	RSU Haji Surabaya
52	RSUD Daha Husada
53	RSUD dr. Saiful Anwar Malang
54	RSUD dr. Soedono Madiun
55	RSUD Dr. Soetomo Surabaya
56	RSUD Dungus
57	RSUD Husada Prima
58	RSUD Karsa Husada Batu
59	RSUD M. Noer Pamekasan
60	RSUD Sumberglagah
61	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
62	Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
63	Satuan Polisi Pamong Praja
64	Sekretariat DPRD

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran : Surat Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.9.1/6869/204.2/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

JADWAL KEGIATAN

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya b. Pembacaan Doa c. Laporan Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi d. Sambutan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	Panitia
09.30 – 10.15	Materi 1 Kualitas Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Tim Pengolahan Data dan Sistem Informasi
10.15 – 11.00	Materi 2 Sosialisasi Sistem Perpanjangan Kontrak PPPK Paruh Waktu	Tim Pengadaan & Tim Pengolahan Data dan Sistem Informasi
11.00 – 11.15	Tanya jawab dan diskusi	Panitia
11.15 – 11.45	*Desk* Kualitas Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Panitia
11.45 – 12.00	Penutupan	Panitia

*)Acara dapat berubah sewaktu-waktu

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.